

TESIS

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG TIDAK
SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN**



OLEH:

**YUGO SUSANDI, S.H.
NIM. 031914153020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI
DENGAN PUTUSAN PENGADILAN**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**YUGO SUSANDI, S.H.
NIM. 031914153020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui Tanggal

Oleh :

Dosen Pembimbing Ketua



(Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.)

NIP. 19680928 1997021001

Pembimbing Kedua



(Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D)

NIP. 198004172005011005

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H. M.Hum.

NIP. 19640107 198903 2 001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 28 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Brahma Astagiri, S.H.,M.H

Anggota : Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum.

Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Iqbal Felisiano, S.H.,LL.M.

Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Januari 2022
Ruang : -
Pukul : 13.30 WIB
Nama Mahasiswa : Yugo Susandi, S.H.
Nim : 031914153020
Judul : Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada program studi Magister Ilmu Hukum, tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, Januari 2022
Yang membuat pernyataan



YUGO SUSANDI, S.H.
NIM. 031914153020

ABSTRAK

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*legal research*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Pengaturan Pelaksanaan Lelang Barang Bukti Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 Dan KUHAP serta Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

Terdapat konflik antar norma hukum (*conflict of norm*) antara pengaturan pelaksanaan lelang barang bukti di dalam KUHAP dan pengaturan pelaksanaan lelang barang bukti di dalam PERJA Nomor. PER-002/A/JA/05/2017. Di dalam ketentuan KUHAP, pelaksanaan lelang barang bukti dalam perkara pidana dilakukan berdasarkan isi putusan Hakim, sedangkan di dalam PERJA Nomor. PER-002/A/JA/05/2017, Jaksa selaku eksekutor dapat melakukan lelang terhadap barang bukti yang tidak diketemukan pemiliknya meskipun tidak sesuai dengan isi putusan Hakim. Sebagai tindak lanjut dari PERJA Nomor. PER-002/A/JA/05/2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/Pmk.06/2018. Di dalam Permenkeu Nomor 13/PMK.06/2018 diatur tentang kewajiban pihak pemohon lelang dalam hal ini Kejaksaan untuk membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam setiap permohonan lelangnya.

Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam Persetujuan Penetapan Status Benda Sitaan Untuk Dilelang Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-14/Q211/Es.1/10/2017 dan Persetujuan Penetapan Status Benda Sitaan Untuk Dilelang Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor. B.2/Q.211/Es.1/10/2017. Adapun alasan pelaksanaan lelang tersebut dilakukan karena pemilik barang bukti tidak mengambil barangnya dalam waktu 6 (enam) bulan. Tentunya hal tersebut menimbulkan masalah di Kejaksaan setempat yang menyebabkan menumpuknya barang sitaan yang disimpan di gudang barang bukti Kantor Kejaksaan setempat. Terlebih lagi jika dibiarkan maka barang tersebut akan rusak dan tidak mempunyai nilai. Oleh sebab itu, Kejaksaan melakukan eksekusi dengan cara melakukan lelang terhadap barang tersebut untuk tetap menjaga nilai dari barang tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Perja Nomor. PER-002 /A/JA/2017. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan/eksekutor sesuai dengan Teori Kemanfaatan Hukum.

Kata Kunci : Eksekusi, Barang Bukti, Perkara Pidana

ABSTRACT

The type of research used in this thesis is normative juridical (legal research), using a statutory approach, and a conceptual approach. The problems in this thesis are: Arrangements for the Implementation of the Auction of Evidence in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: Per-002/A/Ja/05/2017 and the Criminal Procedure Code and the Execution of Evidence that is Not In Accordance with the Court's Decision.

There is a conflict between legal norms (conflict of norm) between the regulation of the auction of evidence in the Criminal Procedure Code and the regulation of the auction of evidence in PERJA Number. PER-002/A/JA/05/2017. In the provisions of the Criminal Procedure Code, the auction of evidence in criminal cases is carried out based on the contents of the judge's decision, while in PERJA Number. PER-002/A/JA/05/2017, the Prosecutor as the executor can conduct an auction of evidence that is not found by the owner even though it is not in accordance with the contents of the judge's decision. As a follow-up to PERJA No. PER-002/A/JA/05/2017, the Ministry of Finance issued Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 13/Pmk.06/2018. The Minister of Finance Regulation No. 13/PMK.06/2018 regulates the obligation of the bidder, in this case the Prosecutor's Office, to make a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in each bid application.

Execution of evidence that is inconsistent with the court's decision as stated in the Approval of Determination of the Status of Confiscated Objects to be Auctioned by the East Kotawaringin District Attorney Number B-14/Q211/Es.1/10/2017 and the Approval of Determination of the Status of Confiscated Objects to be Auctioned by the East Kotawaringin District Attorney Number . B.2/Q.211/Es.1/10/2017. The reason for the auction is because the owner of the evidence does not take the goods within 6 (six) months. Of course, this caused problems at the local Prosecutor's Office which caused the confiscated items to be piled up in the evidence warehouse of the local Prosecutor's Office. Moreover, if left unchecked then the item will be damaged and have no value. Therefore, the Prosecutor's Office carried out the execution by conducting an auction of the goods in order to maintain the value of the goods as regulated in Article 3 Perja No. PER-002 /A/JA/2017. What is done by the Prosecutor's Office as the executor of court decisions/executors is in accordance with the Legal Benefit Theory.

Keywords: Execution, Evidence, Criminal Case

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan**. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II dan Bapak Maradona, SH.,LL.M., Ph.D selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum selaku Ketua program studi magister hukum Universitas Airlangga, terimakasih atas bimbingan dan bantuannya;
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
5. Bapak Taufik Rachman, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen MKPT I;
6. Bapak Sapta Aprilianto, S.H.,M.H.,LL.M. selaku Dosen MKPT II;
7. Bapak Brahma Astagiri, S.H.,M.H. selaku Dosen Ketua Penguji;
8. Bapak Iqbal Feisiano, S.H.,.,H.,LL.M. selaku Dosen Penguji;
9. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;

10. Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga terima kasih atas semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Tesis ini selesai;
11. Pimpinan dan rekan-rekan di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang telah memberikan motivasi dan semua bantuannya;
12. Istri tercinta dan Anak tersayang yang selalu memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Januari 2022

Yugo Susandi, S.H.
NIM. 031914153020

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.5.1. Sistem Peradilan Pidana.....	11
1.5.2. Eksekusi Barang Bukti.....	15
1.5.3. Putusan Pengadilan	21
1.6. Metode Penelitian	24
1.6.1. Tipe Penelitian	25
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	25
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	26
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	27
1.7. Sistematika Penulisan	28

BAB II PENGATURAN PELAKSANAAN LELANG BARANG BUKTI DALAM PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR: PER-002/A/JA/05/2017 DAN KUHAP

2.1. Barang Bukti dan Penyitaan Dalam Perkara Pidana	30
2.1.1 Pengertian Barang Bukti	30
2.1.2 Pengertian Penyitaan.....	32
2.2. Pelaksanaan Lelang.....	39
2.2.1. Pengertian Lelang.....	39
2.2.2. Pengaturan Pelaksanaan Lelang dalam KUHAP.....	49
2.2.3. Pengaturan Pelaksanaan Lelang dalam PERJA Nomor. PER- 002/A/JA/05/2017	53
2.3. Penyelesaian <i>Conflict of Norm</i> Dalam KUHAP dan PERJA Nomor PER- 002/A/JA/2017 terkait Pelaksanaan Eksekusi Lelang Barang Bukti	63

**BAB III EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PUTUSAN PENGADILAN**

3.1. Ekekusi.....	70
3.1.1 Pengertian Eksekusi	70
3.1.2 Hubungan Eksekusi dan Penyitaan	76
3.2. Putusan Pengadilan	77
3.2.1. Pengertian Putusan Pengadilan	77
3.2.2. Putusan Pengadilan Yang Dapat di Eksekusi	84
3.3. Analisis Contoh Kasus Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Yang Tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan	88

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	112
4.2. Saran	114

DAFTAR BACAAN